



PNS Harus Benar-benar Kerja

Pemerintah Kota Yogyakarta Luncurkan 86 Program Inovasi Daerah

TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan 86 rencana inovasi dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja di lingkungan pemerintah setempat. Inovasi itu dibikin agar pegawai negeri sipil (PNS) benar-benar kerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Peluncuran program inovasi daerah dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Jumat (22/5) di Balai Kota Yogyakarta. Kepala LAN RI Agus Dwiyono mengatakan inovasi dari pemerintah daerah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab seringkali pegawai di lingkungan pemerintah hanya bekerja sesuai rutinitas keseharian saja.

"Pekerjaan dilakukan sesuai rutinitas, padahal ada beberapa hal yang bisa diperbaiki guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa melanggar aturan," katanya.

Oleh karena itu, ia menolak apabila inovasi yang dilakukan oleh SKPD atau unit kerja dilingkungan pemerintah daerah bisa melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

LAN memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam peluncuran inovasi daerah tersebut. Pada awalnya, ada 122 ide inovasi yang muncul dari 92 SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Setelah disaring, hanya 86 inovasi yang akan diimplementasikan.

Inovasi daerah yang berjumlah 86 itu di antaranya mencakup tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik.

Sebelumnya program itu melewati lima tahap yakni persiapan atau *drafting*, pengumpulan inovasi dari setiap SKPD, desain/rencana aksi inovasi, implementasi inovasi, dan tahap terakhir *display* inovasi.

Selain pekerjaan yang dilakukan berdasarkan rutinitas semata, kurangnya inovasi dari pegawai pemerintah daerah disebabkan banyak pegawai yang sudah terbiasa melakukan pekerjaan secara berkelompok dan kurangnya pelatihan yang diterima pegawai.

Agus Dwiyanto juga menuturkan PNS kurang diperhatikan pemerintah, terutama terkait akses untuk pelatihan demi meningkatkan kemampuan. Selama ini PNS dianggap sebagai faktor produksi saja. Padahal menurut Agus, PNS adalah aset.

"Anggaran belanja pe-

1.			
2.			
3.			
4.	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
5.			

Tindak Lanjut
 Jntuk Ditanggapi
 Jntuk Diketahui

■ Bersambung ke Hal 14

latihan itu jangan dianggap anggaran belanja pegawai. PNS ini layaknya aset, kalau sebagai aset, ya harus pelihara. Selama ini pemerintah kurang perhatian terhadap PNS, terutama akses untuk pelatihan," ujar Agus.

Minim

Agus menyebut hingga saat ini porsi pelatihan pegawai negeri memang masih minim. Sebagai contoh PNS, dalam kurun waktu 26 tahun, hanya mendapat pelatihan sekali. Agus pun pernah menemui kasus guru yang sudah 30

tahun bekerja tetapi hanya sekali ikut pelatihan.

"Kawan di birokrasi pemerintah ini *kan* bekerja secara rutin, setiap hari. Tidak ada upaya atas mereka yang sudah dilakukan. Mereka dituntut bekerja secara kreatif, tetapi pelatihan saja jarang, bagaimana memikirkan gagasan yang baru dan cerdas, kalau akses pelatihan itu kecil." tutur Agus.

LAN, lanjut dia, sudah meminta Kementerian Keuangan untuk meningkatkan alokasi anggaran guna pelatihan pegawai negeri.

Ia berharap, Yogyakarta yang sudah ditunjuk sebagai laboratorium inovasi daerah bisa memberikan contoh yang baik bagi daerah lain di Indonesia dalam mengembangkan inovasinya.

"Jika terbiasa melakukan inovasi, maka inovasi-inovasi akan terus muncul dan pemerintah tidak lagi takut menghadapi arus globalisasi," katanya.

Seusai peluncuran akan dilanjutkan dengan tahap terakhir yaitu pameran hasil inovasi daerah pada akhir tahun.

Sementara itu, Wali

Kota Yogyakarta haryadi Suyuti mengatakan, terdapat beberapa bidang inovasi daerah di antaranya tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat.

"Tujuan dari inovasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga efisien dan masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah," katanya.

Namun ia mengingatkan agar seluruh SKPD dan unit kerja tetap memenuhi standar pelayanan minimal saat melakukan inovasi. (rfk/ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005